

KONFLIK ROHINGYA: AKAR MASALAH, PENYELESAIAN, DAN PERAN INDONESIA

Mahfud Khoirul Amin
Universitas Gajah Mada, Indonesia
E-mail: Mahfudka@yahoo.co.id

Abstract: The prolonged conflict in Rohingya has resulted in many victims. This humanitarian crisis attracted the attention of a globalized world. International organizations and several countries are flocking to solve this problem. However, some constraints and problems in completing it. Therefore this article will attempt to explain the cause of conflict and some of the world's global efforts in completing it. In this paper will also discussed some of the problems and also Indonesia's role in resolving this conflict. As well as some of the criticism and suggestions to solve the conflict in rohingya

Keywords: Rohingya, ASEAN, OKI, Human Right, Indonesia

Pendahuluan

Konflik di Rohingya, Myanmar merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Masalah kemanusiaan yang dialami oleh Etnis Rohingya ini telah menarik perhatian masyarakat internasional dalam dekade terakhir. Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), hingga 8 September 2017 konflik Rakhine telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan lebih dari 313.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Para pengungsi Rohingya tersebut tidak lagi bertempat tinggal karena militer Myanmar membakar rumah mereka.¹

Berbagai macam upaya dilakukan oleh banyak pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh ASEAN, melalui ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Yang mana memiliki misi untuk mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia pada masyarakat ASEAN.² Adapun beberapa upaya juga dilakukan oleh organisasi internasional (seperti OKI, ASEAN, dll) dan juga negara-negara kawasan Asia Tenggara maupun yang lainnya.

Akan tetapi upaya-upaya yang dilakukannya belum terdapat dampak yang signifikan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi. Baik terhadap organisasi internasional, maupun negara-negara yang ingin membantu. Hingga usaha-usaha yang dilakukan pun seakan belum membuahkan hasil. Sehingga konflik yang terjadi di Rohingya, Myanmar masih terus berlangsung sampai saat ini. Indonesia sebagai salah satu tetangga Myanmar, semestinya mampu menyediakan bantuan bagi Rohingya. Baik dalam menyelesaikan konflik tersebut, bantuan pengungsi, ataupun kontribusi yang lainnya. Oleh karena itu dalam tulisan ini tidak hanya akan membahas mengenai akar masalah dan upaya penyelesaian konflik ini, akan tetapi juga membahas pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Rohingya, Myanmar..

Dinamika Konflik Rohingya

Penduduk Rohingya merupakan orang yang tinggal di negara bagian Rakhine yang terletak di Pantai Barat Myanmar. Negara ini juga dikenal sebagai Arakan, akan tetapi pada tahun 1989 junta militer mengubahnya menjadi Rakhine untuk memberikan pesan yang jelas bahwa penduduk negara yang Rakhine semua pengikut Buddha. Namun demikian, orang-orang Rohingya telah ada sejak lama sebelum era kolonial Inggris. Menurut perspektif sejarah, orang Rohingya memeluk agama Islam selama Dinasti Mrauk-U kerajaan Arakan oleh pedagang Arab, India, dan Persia.³

Ketika Perang Dunia II berlangsung, Arakan lepas dari kekuasaan Inggris dan dijajah Jepang yang kala itu melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Di tengah penarikan pasukan Inggris dari Arakan, pasukan Muslim Rohingya maupun warga Myanmar penganut agama Buddha berupaya memanfaatkan kesempatan dengan membantai satu sama lain. Kondisi Arakan yang penuh pertumpahan darah membuat banyak warga Rohingya meminta perlindungan kepada Inggris, dan menawarkan diri untuk menjadi mata-mata Sekutu. Ketika pemerintah Jepang mengetahui hal ini, mereka menyiksa, memerkosakan dan membunuh warga Rohingya di Arakan. Puluhan ribu warga Rohingya di Arakan kembali melarikan diri ke Bengali.⁴

Krisis di Rohingya dipicu oleh insiden pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Ma Thida Htwe (27 tahun), seorang gadis Buddhis Arakan, yang dilakukan oleh beberapa oknum muslim Rohingya pada Mei 2012. Insiden tersebut kemudian memicu gejala kebencian terhadap muslim Rohingya di seluruh daerah Arakan. Beberapa hari setelah insiden itu, masyarakat Buddhis Arakan membalas dengan memukuli dan membunuh 10 orang etnis

Rohingya, dalam satu insiden pencegatan dan pembunuhan penumpang bus antar-kota, hingga tewas di Taunggyup.

Insiden pembunuhan tersebut menjadi awal bagi meningkatnya gejala kekerasan yang dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh muslim Rohingya. Kelompok Buddhis Arakan, didukung oleh pendeta Buddha lokal dan aparat keamanan Myanmar, melakukan berbagai tindakan kekerasan secara sistematis terhadap muslim Rohingya meliputi pemukulan, pemenggalan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, pengusiran dan isolasi bantuan ekonomi. Berbagai tindakan kekerasan ini digunakan sebagai cara untuk mengusir etnis Rohingya keluar dari Myanmar.⁵

Pemerintah junta militer Myanmar melakukan pembatasan terhadap hak-hak kewarganegaraan masyarakat Rohingya. Seperti ; kebijakan dua anak, membatasi kelahiran, pembatasan pernikahan, dan pembatasan dalam pergerakan, dan melakukan pengawasan terhadap masyarakat Rohingya.⁶

Adapun perbedaan identitas menjadi salah satu penyebab dari diskriminasi pemerintah setempat.⁷ Pemerintah junta militer Myanmar menolak hak-hak rakyat Rohingya dengan alasan karena penduduk Rohingnya merupakan muslim keturunan Asia Selatan yang condong kepada Bangladesh dibandingkan Myanmar.⁸ Salah seorang pemuka komunitas Myanmar di Malaysia juga menyatakan bahwa “Etnis Rohingya datang dari Bangladesh, bukan warga Myanmar, sama seperti Thailand selatan dan Malaysia bagian utara.”⁹ Ashin Wirathu, salah satu biksu Myanmar dalam pidatonya juga menyatakan bahwa “Etnis Rohingnya mencoba melakukan upaya dalam mengambil kendali di wilayah Myanmar. Salah satunya dengan cara membeli lahan dan bangunan di wilayah Myanmar.”¹⁰ Warga Rohingya etnis Bengali tidak diakui oleh pemerintah junta militer sebagai warga negara sehingga mereka sering mengalami tindakan diskriminasi.¹¹

Penduduk Rohingya juga dituduh berafiliasi dengan para pemberontak Mujahidin yang ingin mendirikan negara Islam di daerah Mayu, Rakhine utara berbatasan dengan Bangladesh. Banyak warga Rohingya terutama etnis Bengali yang melarikan diri ke Bangladesh dan Negara lain untuk berlindung dari operasi militer tersebut. Sejak peristiwa itulah, warga Rohingya dianggap sebagai imigran gelap. Mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk di Myanmar dan hidup sengsara sampai saat ini.¹²

Adapun klimaks dari penindasan oleh junta Myanmar dicapai pada bulan Mei 1978 ketika penguasa telah diluncurkan operasi disebut Naga-Min (Dragon-Min Operation) untuk menghapuskan imigran ilegal yang telah tinggal di Myanmar.¹³ Warga Rohingya banyak yang mengalami penyiksaan,

penangkapan sewenang-wenang, dan pembunuhan massal. Bahkan dalam sebulan terakhir, tercatat 650 orang etnis Rohingya tewas, 1.200 warga hilang, dan sekitar 80 ribu lainnya kehilangan tempat tinggal.¹⁴

Direktur Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan di Indonesia (Heri Aryanto) mengatakan bahwa :

Pemerintah Myanmar berada dibalik kerusuhan yang menimpa Muslim Rohingya dengan membiarkan kerusuhan serta pembakaran rumah dan masjid. Selain itu, Heri menyebutkan adanya tim khusus yang disebut Rohingya Elimination Group (REG). REG merupakan sebuah kelompok yang dibuat untuk menghilangkan etnis Muslim di Myanmar yang terkenal dengan 969. Kelompok ini sengaja dibentuk untuk menyingkirkan etnis Muslim dan juga melakukan provokasi terhadap warga dengan distribusi buku atau video yang menghina Islam dan Muslim.¹⁵

Hingga 8 September 2017 konflik Rakhine telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan lebih dari 313.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.¹⁶

Upaya Beberapa Pihak

Konflik yang berkepanjangan di Rohingya, Myanmar mengakibatkan tewasnya banyak korban. Hal inilah yang membuat dunia global menyoroti isu ini. Adapun upaya-upaya mediasi ataupun penyelesaian konflik tersebut, terus dilakukan oleh organisasi-organisasi baik regional maupun internasional. Sebagaimana menurut Biddle, “salah satu peran organisasi internasional adalah sebagai komunikator dan perantara terutama dalam menyelesaikan sebuah konflik.”¹⁷

Salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh upaya OKI dalam melakukan ekspansi bagi perdamaian antar kaum minoritas Muslim Rohingya dan Budha Rakhine di Myanmar. Yang mana kesepakatan demi kesepakatan dan pertemuan yang dilakukan oleh OKI dan Myanmar serta melibatkan PBB sebagai mediator.¹⁸

Upaya lainnya juga dilakukan oleh AICHR, seperti; Pertama mengadakan beberapa pertemuan guna membahas penegakan HAM di ASEAN. AICHR juga telah menjadwalkan serangkaian konsultasi untuk menilai dan mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Kedua, mengadakan beberapa workshop di Myanmar, yang mana dihadiri oleh praktisi CSR dan hak asasi manusia, dan stakeholder lainnya regional dari pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil dan wakil-wakil AICHR. Ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat ASEAN tentang hak asasi

manusia.¹⁹ Adapun hal ini selaras dengan misi AICHR, yaitu mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia pada masyarakat ASEAN.²⁰

Tidak hanya organisasi internasional, beberapa negara pun turut membantu dan mendukung dalam penyelesaian konflik ini. Seperti halnya pemerintah Turki melalui perdana menteri Ahmet Davutoglu memberikan bantuan terhadap etnis muslim Rohingya sebesar 3,4 juta lira Turki atau sekitar 16 miliar rupiah yang dianggap sebagai bantuan luar negeri pertama untuk para migran Islam Rohingya yang bermigrasi untuk mencari bantuan ke negara lain melewati perjalanan laut. Pemerintah Turki juga mengirimkan delegasinya menuju kamp pengungsian untuk bertemu dan memberikan bantuan langsung berupa makanan bagi 1500 migran Rohingya yang dipimpin oleh istri Perdana Menteri, Emine Erdoğan.²¹

Adapun Perdana Menteri Malaysia dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott mendukung adanya upaya-upaya untuk mengatasi masalah di Rohingya, terutama berkaitan dengan pengungsi Rohingya yang menggunakan perahu. Begitu halnya dengan Singapura yang memberikan dukungan penuh dan menyambut inisiatif dari Malaysia dan Indonesia untuk menyediakan tempat penampungan sementara untuk pengungsi Rohingya, akan tetapi negara ini tidak dapat menerima mereka karena tanah terbatas.²²

Kendala Yang Dihadapi

Seharusnya pemerintah Myanmar harus terus berupaya memperkuat penegakan HAM di negaranya, sebagaimana Hak Asasi Manusia itu sendiri memperkuat budaya di ASEAN. Secara spesifik bahkan tidak hanya dalam segi HAM, melainkan juga harusnya ada perubahan yang bertahap dari segi demokrasi, aturan hukum dan good governance.²³

Pendekatan yang dilakukan ASEAN dalam penyelesaian konflik di Rohingnya tidak berdampak secara signifikan.²⁴ Begitu halnya pendekatan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa upaya yang dilakukan baik oleh OKI, AICHR, PBB, maupun negara-negara lainnya pun tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan terdapat banyak kendala dan kesulitan, antara lain;

Pertama, tertutupnya Myanmar terhadap pihak luar, baik organisasi internasional dan negara-negara lain. Serta Political diversity di dalam ASEAN sendiri tetap menjadi persoalan ketika hendak mencapai kesepakatan dalam persoalan HAM.²⁵ Hal ini menyulitkan beberapa negara dan organisasi internal dalam menyelesaikan masalah ini.

Kedua, dikarenakan ASEAN menganut prinsip non-intervensi yaitu prinsip untuk memastikan bahwa masalah setiap negara harus diurus masing-masing tanpa adanya campur tangan dari pihak luar.²⁶ Sebagai bagian dari ASEAN, Myanmar terikat terhadap prinsip-prinsip ASEAN, yakni penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Prinsip ini, langsung atau tidak langsung, telah menyulitkan berbagai pihak dalam terlibat terhadap persoalan negara anggota ASEAN.

Ketiga, dalam kaitan AICHR (sebagai lembaga yang bertanggung jawab akan penegakan HAM di ASEAN), AICHR memiliki independensi yang lemah: dari segi keanggotaan, tanggung jawab/akuntabilitas anggota pada pemerintah yang menunjuk, dari segi pendanaan. AICHR juga merupakan lembaga yang lemah yang tunduk dan tergantung kepada kedaulatan ataupun undang-undang di setiap negara.²⁷ Adapun mekanisme proteksi yang lemah: tidak ada wewenang menerima pengaduan individual, wewenang untuk investigasi, wewenang untuk country visit, dan tidak ada pembahasan country situation. Komisi, juga tidak dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara dan pembahasan masalah HAM hanya dapat dilakukan dalam tingkat dialog. Hal ini Lay yang menyebabkan selama krisis Rohingya berlangsung, AICHR mengalami kegagalan (baik berupa kebijakan maupun tindakan) dalam upaya penyelesaian konflik ini. AICHR tidak memiliki inisiatif dalam memaksa ASEAN untuk memimpin penyelesaian konflik Rohingya.²⁸

Peran Indonesia

Memang pada dasarnya memang penegakkan HAM di Asia Tenggara bukanlah hal yang mudah.²⁹ Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya pelanggaran HAM di negara Myanmar, yang mana dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar kepada Etnis Rohingya.³⁰ Krisis yang dimulai pada Mei 2012 ini, telah meneran banyak korban dan memicu konflik yang berkepanjangan. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh beberapa organisasi internasional seperti ASEAN seakan tak kunjung mendatangkan hasil. Salah satu faktor yang mengakibatkannya adalah tertutupnya pemerintah Myanmar terhadap negara lain termasuk organisasi internasional.³¹

Indonesia sebagai salah satu tetangga Myanmar mestinya mampu menyediakan bantuan bagi Rohingya sebagai negara penerima pengungsi. Akan tetapi Indonesia masih belum memiliki landasan dasar hukum yang kuat untuk membuatnya terikat kewajiban dalam penyelesaian masalah pengungsi sebagai negara penerima pengungsi, sebagai konsekwensi tidak

diratifikasinya konvensi dan protokol 1951 terkait status Pengungsi. Pemerintah belum meratifikasi konvensi tersebut karena menganggap dirinya belum mampu secara nasional. Keadaan tersebut membuat Indonesia hanya berfokus kepada penanganan imigran gelap alih-alih penerimaan dan penyediaan bantuan pengungsi.³²

Adapun konflik ini mendorong beberapa ormas keagamaan di Indonesia berkeinginan melakukan aksi bela Rohingya di kawasan candi Borobudur dan mengirim kadernya untuk melakukan jihad di Myanmar. Selain itu, terjadi aksi pengumpulan donasi kemanusiaan untuk Rohingya secara sukarela di berbagai daerah.³³ Meskipun tidak memiliki landasan dasar hukum yang kuat, Indonesia telah berupaya memberikan pertolongan kepada pengungsi Rohingya secara mandiri. Adapun upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik ini, antara lain ;

Indonesia menerima kedatangan pengungsi Rohingya. Indonesia sebagai negara penjunjung kemanusiaan yang berpihak pada penderitaan Rohingya telah menampung sekitar 12.000 warga Rohingya yang mengungsi sejak 2015.³⁴ Indonesia juga telah mengirim surat kepada Presiden Thein Sein, dan menjadi pelopor pembahasan konflik Rohingya pada forum KTT ASEAN.³⁵

Selanjutnya, Indonesia bekerjasama dengan OKI dalam membantu penyelesaian konflik Rohingya. Pada era Yudhoyono melalui Menlu Marty Natalegawa mengajak OKI untuk berkontribusi dalam membantu penyelesaian konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Dalam pertemuan OKI di Kuala Lumpur, Indonesia menyampaikan pandangan bahwa pilihan yang paling tepat adalah membiarkan masyarakat Rohingya tinggal di wilayahnya yang sekarang. Hingga pada 13 Agustus 2012 OKI melakukan kunjungan ke Myanmar dan memberikan bantuan dana pembangunan 800 unit rumah untuk etnis Rohingya.³⁶ Melalui OKI, Indonesia juga meminta Pemerintah Myanmar untuk mengakui keberadaan masyarakat Rohingya. Dan OKI harus menyampaikan bahwa organisasi itu akan membantu memperbaiki kehidupan masyarakat Rohingya agar mereka bisa mandiri dan tidak menjadi beban bagi lingkungannya.³⁷

Dalam pertemuan di PBB, Indonesia menyampaikan empat usulan solusi bagi masa depan Rohingya yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine. Empat elemen formula tersebut yaitu: (1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (3) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama; dan (4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Keempat elemen utama tersebut harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak memburuk. Satu

elemen tambahan adalah pentingnya implementasi rekomendasi dari Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine yang dipimpin Kofi Annan sesegera mungkin.³⁸

Indonesia juga menunjuk Jusuf Kalla menjadi Special Envoy, menunjuk PMI sebagai lembaga yang mengkoordinir bantuan bagi etnis Rohingya dan memberikan bantuan 1 Juta Dollar AS.³⁹ Presiden Myanmar memberi izin kepada Indonesia untuk melihat langsung kehidupan masyarakat Rohingya, agar tahu duduk perkara yang sebenarnya.⁴⁰ Melalui Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla beranjak ke Myanmar untuk menemui Presiden Thein Sein serta berkunjung ke Rakhine untuk melihat kehidupan masyarakat Rohingya dan juga mengawal bantuan kemanusiaan.⁴¹ Adapun kunjungan tersebut menghasilkan rencana pembangunan perumahan yang baru. Teman-teman PMI, dari Qatar, Kuwait, Saudi sepakat membangun empat ribu rumah. Hingga kini, tim PMI masih berada di Myanmar untuk menyusun program bersama pemerintah setempat. Presiden Myanmar U Thein Sein mengapresiasi upaya Ketua umum PMI Jusuf Kalla.⁴²

Indonesia memberikan bantuan dari berbagai macam aspek, seperti: peningkatan kapasitas termasuk bagi polisi dan aparat keamanan, kemampuan diplomasi, serta memfasilitasi kegiatan interfaith dialogue untuk mendukung upaya rekonsiliasi di Rakhine.⁴³ Memberikan bantuan kepada Pemerintah Myanmar dengan metode Sharing of expertise dengan memfasilitasi kunjungan delegasi Myanmar ke Aceh. Serta, berkontribusi dalam memajukan perekonomian Myanmar dengan mengirimkan BUMN Indonesia untuk berinvestasi di Myanmar, serta membentuk Blue Books on Indonesia-Myanmar Capacity Building Partnership.⁴⁴

Kesimpulan

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Rohingya, Myanmar telah menelan banyak korban. Hal ini mendapatkan sorotan oleh masyarakat global, banyak negara dan organisasi internasional yang mencoba memberikan bantuan terutama dalam menyelesaikan konflik ini. Seperti beberapa upaya yang dilakukan ASEAN melalui AICHR dan OKI. Serta beberapa upaya yang dilakukan negara-negara baik sekitar Asia tenggara maupun wilayah lainnya. Adapun upaya-upaya tersebut seakan tidak berdampak pada hasil yang signifikan, begitu halnya upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Sebaiknya pemerintah Myanmar harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan juga menegakkan HAM di wilayahnya.

Terutama dengan banyaknya dukungan dari dunia global seharusnya menggerakkan pemerintah Myanmar untuk memperbaiki negaranya.

Adapun sebagai usulan dalam upaya penyelesaian konflik, diharapkan adanya peran lebih dari PBB untuk mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan ini. Terutama melalui Dewan Keamanan, PBB dapat melakukan intervensi dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Selanjutnya adalah adanya bentuk teguran keras (dapat berupa hukuman diplomatis) dari beberapa negara diharapkan mampu menggugah pemerintah Myanmar. Serta kecaman yang menyeluruh dari dunia global juga diharapkan mampu menyelesaikan konflik tersebut.

Catatan Akhir

¹ Adirini Pujayanti, INDONESIA DAN TRAGEDI KEMANUSIAAN ROHINGYA, Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. IX, No. 17/I/Puslit/September/2017, p. 5

² Irawan Jati, Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis, IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 1, No. 1, July 2017, p. 25

³ Aizat Khairi, The Dilemma of Rohingya Refugees “Boat People”: The Role of Malaysia, its Neighbors and ASEAN, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2016, Vol. 6, No. 12. p.482

⁴ Ranny Utami, Mengenal Etnis Rohingya Lebih Dekat, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925171827-113-4396/mengenal-etnis-rohingya-lebih-dekat>, 20 Agustus 2015

⁵ Adhe Nuansa Wibisono, ASEAN, Rohingnya dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar, diakses dari <http://www.anwibisono.com/2013/08/asean-rohingnya-dan-krisis-kemanusiaan.html>, 30 Agustus 2015

⁶ Irawan Jati, Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis, IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 1, No. 1, July 2017, p. 21

⁷ Samodra, Jhendra A, Urgensi Problem Rohingya, Indonesia, dan Konvensi Terkait, Institute of International Studies, Volume 10, Issue 1, September 2012.

⁸ Aizat Khairi, The Dilemma of Rohingya Refugees “Boat People”: The Role of Malaysia, its Neighbors and ASEAN, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2016, Vol. 6, No. 12. p.482

⁹ Rohmatin Bonasir, Warga Myanmar angkat bicara tentang identitas Rohingya, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150426_rohingnya_myanmar_nasionalis, 31 Desember 2015.

¹⁰ Ini Dia Biksu Ekstrimis Penyulut Pembantaian Muslim Rohingya di Meiktila, diakses dari <https://www.nahimunkar.com/ini-dia-biksu-ekstrimis-penyulut-pembantaian-muslim-rohingya-di-meiktila>, 31 Desember 2015

¹¹ Dewa Gede Sudika Mangku “ KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN“, Media Komunikasi FIS, Volume 12, 2 Agustus 2013

¹² Alfi Revolusi, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ETNIS RAKHINE DAN ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2012, diakses dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1977>, 1 Oktober 2015

¹³ Aizat Khairi, The Dilemma of Rohingya Refugees “Boat People”: The Role of Malaysia, its Neighbors and ASEAN, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2016, Vol. 6, No. 12. p.482

¹⁴ Dewa Gede Sudika Mangku “ KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN“, Media Komunikasi FIS, Volume 12, 2 Agustus 2013

¹⁵ Saiful Bahri, Pemerintah Myanmar Dalang Kerusuhan di Rohingya, diakses dari <http://www.dakwatuna.com/2013/05/03/32564/pemerintah-myanmar-dalang-kerusuhan-di-rohingya/#axzz3YjcZxSbe>, 1 Oktober 2015

¹⁶ Yorry Hasanah, PERAN MSF (MÉDECINS SANS FRONTIÈRES) DALAM MENANGANI EPIDEMI EBOLA DI AFRIKA BARAT TAHUN 2012-2014, Jom FISIP Universitas Riau, Volume 2 NO. 2 Oktober 2015.

¹⁷ Saflembolo, Monalisa (2015), UPAYA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) DALAM MENGATASI KONFLIK ETNIS ANTARA MUSLIM ROHINGYA DAN BUDHA RAKHINE DI MYANMAR (2011-2014), Tesis, UPN "Veteran", Yogyakarta.

¹⁸ Ananda Ruriksa Saputri,. " PERAN ASEAN Intergovernmental Commission Of Human Rights (AICHR) DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI KAWASAN NEGARA ANGGOTA ASEAN." *ejournal.hi.fisip-unmul.org*, 1 Februari 2014.

¹⁹ Irawan Jati, Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis, IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 1, No. 1, July 2017, p. 25

²⁰ Ringgo Febriar, IDENTITAS DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI: BANTUAN KEMANUSIAAN TURKI KEPADA ETNIS ROHINGYA PASCA KONFLIK KOMUNAL MYANMAR TAHUN 2012-2015, Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016, p. 64

²¹ Aizat Khairi, The Dilemma of Rohingya Refugees “Boat People”: The Role of Malaysia, its Neighbors and ASEAN, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2016, Vol. 6, No. 12. p.486

²² Tan Hsien-L, ASEAN’s Impact on Myanmar’s Transformation: Human Rights and Beyond, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), Vol. 107, International Law in a Multipolar World (2013), p. 296

²³ Irawan Jati, Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis, IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 1, No. 1, July 2017, p. 19

²⁴ Wahyudi Djafar dkk, Laporan Penelitian "Memperkuat Perlindungan HAM di Asia Tenggara", INFID dan ICCO, Desember 2014.

²⁵ Triono, PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS ROHINGNYA, Jurnal TAPIS Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014, p.3

²⁶ Tan Hsien-L, ASEAN's Impact on Myanmar's Transformation: Human Rights and Beyond, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), Vol. 107, International Law in a Multipolar World (2013), p. 295

²⁷ Irawan Jati, Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis, IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 1, No. 1, July 2017, p. 25

²⁸ Potensi Pasar ASEAN” Majalah ASEAN Edisi 4, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, 4 Maret 2014.

²⁹ Utami, Ranny. Mengenal Etnis Rohingya Lebih Dekat. n.d.
<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925171827-113-4396/mengenal-etnis-rohingya-lebih-dekat>.

³⁰ Rafendi Djamin, PERAN STRATEGIS AICHR DALAM MENDORONG PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM DI ASEAN, diakses dari <https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/unduh-dokumen/bahasa-indonesia?download=14:peran-strategis-aichr-dalam-mendorong-pemajuan-dan-perlindungan-ham-di-asean>.

³¹ Samodra, Jhendra A, Urgensi Problem Rohingya, Indonesia, dan Konvensi Terkait, Institute of International Studies, Volume 10, Issue 1, September 2012.

³² Adirini Pujayanti, INDONESIA DAN TRAGEDI KEMANUSIAAN ROHINGYA, Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. IX, No. 17/I/Puslit/September/2017, p. 6

³³ Ibid, p. 7

³⁴ Fatma Arya Ardani, KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA ETNIS ROHINGYA DAN ETNIS RAKHINE DI MYANMAR (STUDI KARAKTER KEPRIBADIAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO), Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015, p. 23

³⁵ Ibid, p. 25

³⁶ Diplomasi Sarung Jusuf Kalla bagi Rohingya.
<http://archive.kaskus.co.id/thread/16000839/0/diplomasi-sarung-jusuf-kalla-bagi-rohingya>

³⁷ Adirini Pujayanti, INDONESIA DAN TRAGEDI KEMANUSIAAN ROHINGYA, Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. IX, No. 17/I/Puslit/September/2017, p. 7

³⁸ Fatma Arya Ardani, KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA ETNIS ROHINGYA DAN ETNIS RAKHINE DI MYANMAR (STUDI KARAKTER KEPRIBADIAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO), Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015, p. 23

³⁹ Diplomasi Sarung Jusuf Kalla bagi Rohingya.
<http://archive.kaskus.co.id/thread/16000839/0/diplomasi-sarung-jusuf-kalla-bagi-rohingya>

⁴⁰ Samodra, Jhendra A, Urgensi Problem Rohingya, Indonesia, dan Konvensi Terkait, Institute of International Studies, Volume 10, Issue 1, September 2012.

⁴¹ Hery H Winarno, Jejak JK, si juru damai konflik, <https://www.merdeka.com/politik/jejak-jk-si-juru-damai-konflik.html>,

⁴² Adirini Pujayanti, INDONESIA DAN TRAGEDI KEMANUSIAAN ROHINGYA, *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. IX, No. 17/I/Puslit/September/2017, p. 7

⁴³ Fatma Arya Ardani, KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA ETNIS ROHINGYA DAN ETNIS RAKHINE DI MYANMAR (STUDI KARAKTER KEPRIBADIAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO), *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015, p. 23

⁴⁴ Ibid, p. 23

Daftar Referensi.

Adhe Nuansa Wibisono, ASEAN, Rohingnya dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar, diakses dari <http://www.anwibisono.com/2013/08/asean-rohingnya-dan-krisis-kemanusiaan.html>, pada tanggal 30 Agustus 2015

Adirini Pujayanti, INDONESIA DAN TRAGEDI KEMANUSIAAN ROHINGYA, *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. IX, No. 17/I/Puslit/September/2017

Aizat Khairi, The Dilemma of Rohingya Refugees “Boat People”: The Role of Malaysia, its Neighbors and ASEAN, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 2016, Vol. 6, No. 12

Aizat Khairi, The Dilemma of Rohingya Refugees “Boat People”: The Role of Malaysia, its Neighbors and ASEAN, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 2016, Vol. 6, No. 12

Alfi Revolusi, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ETNIS RAKHINE DAN ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2012, diakses dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1977>, pada tanggal 1 Oktober 2015

Ananda Ruriksa Saputri, " PERAN ASEAN Intergovernmental Commission Of Human Rights (AICHR) DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI KAWASAN NEGARA ANGGOTA ASEAN." *ejournal.hi.fisip-unmul.org*, 1 Februari 2014.

Dewa Gede Sudika Mangku “ KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN“, *Media Komunikasi FIS*, Volume 12, 2 Agustus 2013

Diplomasi Sarung Jusuf Kalla bagi Rohingya.

<http://archive.kaskus.co.id/thread/16000839/0/diplomasi-sarung-jusuf-kalla-bagi-rohingya>

Fatma Arya Ardani, KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA ETNIS ROHINGYA DAN ETNIS RAKHINE DI MYANMAR (STUDI KARAKTER KEPRIBADIAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO), *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015

Hery H Winarno, Jejak JK, si juru damai konflik,

<https://www.merdeka.com/politik/jejak-jk-si-juru-damai-konflik.html>,

Ini Dia Biksi Ekstrimis Penyulut Pembantaian Muslim Rohingya di Meiktila, diakses dari <https://www.nahimunkar.com/ini-dia-biksu-ekstrimis-penyulut-pembantaian-muslim-rohingya-di-meiktila>, pada tanggal 31 Desember 2015

Irawan Jati, Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis, *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 1, No. 1, July 2017, p. 25

Potensi Pasar ASEAN” *Majalah ASEAN Edisi 4*, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, 4 Maret 2014.

Rafendi Djamin, PERAN STRATEGIS AICHR DALAM MENDORONG PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM DI ASEAN, diakses dari <https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/unduh-dokumen/bahasa-indonesia?download=14:peran-strategis-aichr-dalam-mendorong-pemajuan-dan-perlindungan-ham-di-asean>.

Ranny Utami, Mengenal Etnis Rohingya Lebih Dekat, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925171827-113-4396/mengenal-etnis-rohingya-lebih-dekat>, pada tanggal 20 Agustus 2015. Aizat Khairi, The Dilemma of Rohingya Refugees “Boat People”: The Role of Malaysia, its Neighbors and ASEAN, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 2016, Vol. 6, No. 12

Ringgo Febriar, IDENTITAS DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI: BANTUAN KEMANUSIAAN TURKI KEPADA ETNIS ROHINGYA PASCA KONFLIK KOMUNAL MYANMAR TAHUN 2012-2015, *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016

- Rohmatin Bonasir, Warga Myanmar angkat bicara tentang identitas Rohingya, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150426_rohingnya_myanmar_nasionalis, pada tanggal 31 Desember 2015.
- Saflembolo, Monalisa (2015), UPAYA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) DALAM MENGATASI KONFLIK ETNIS ANTARA MUSLIM ROHINGYA DAN BUDHA RAKHINE DI MYANMAR (2011-2014), Tesis, UPN "Veteran", Yogyakarta.
- Saiful Bahri, Pemerintah Myanmar Dalang Kerusuhan di Rohingya, diakses dari <http://www.dakwatuna.com/2013/05/03/32564/pemerintah-myanmar-dalang-kerusuhan-di-rohingya/#axzz3YjcZxSbe>, pada tanggal 1 Oktober 2015
- Samodra, Jhendra A, Urgensi Problem Rohingya, Indonesia, dan Konvensi Terkait, Institute of International Studies, Volume 10, Issue 1, September 2012.
- Tan Hsien-L, ASEAN's Impact on Myanmar's Transformation: Human Rights and Beyond, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), Vol. 107, International Law in a Multipolar World (2013)
- Triono, PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS ROHINGNYA, Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
- Ranny Utami, Mengenal Etnis Rohingya Lebih Dekat. n.d. <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925171827-113-4396/mengenal-etnis-rohingya-lebih-dekat>.
- Wahyudi Djafar dkk, Laporan Penelitian "Memperkuat Perlindungan HAM di Asia Tenggara", INFID dan ICCO, Desember 2014.
- Yorry Hasanah, PERAN MSF (MÉDECINS SANS FRONTIÈRES) DALAM MENANGANI EPIDEMI EBOLA DI AFRIKA BARAT TAHUN 2012-2014, Jom FISIP Universitas Riau, Volume 2 NO. 2 Oktober 2015.